

ARTIKEL

**MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU
DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE**

SARTIKA BUDIANA



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

Abstract

Sartika Budiana. 2016. The Management of Teachers Education and Training in Education Department Office in Bone District (supervised Chalid Imran Musa and Ratmawati T.)

The objectives of the research are to examine (i) the management of teachers education and training in Education Department Office in Bone District, (ii) the supporting and inhibiting factors of the management of teachers education and training in Education Department Office in Bone District. This type of research is qualitative research that is descriptive. The data in this study were collected by the method of interview and documentation as well as performed data validation by triangulation. Informants in this study consists of four people: to the education service District Staffing Agency, head of the Bone in Bone County Education Office, a clerk in the Office of education Bone Regency, and a school superintendent in Bone County Office of education. The results showed that (i) management education and teacher training in the education service District offices of Bone include four stages, namely (a) the planning of technical nature, (b) the Division of tasks which include organizing officials, (c) the implementation of which is the implementation of planning, and (d) monitoring / oversight process that includes evaluation as a basis for improvements in the implementation of further Training; (ii) there are factors that promote and hinder the associated Management Training of teachers in education service District offices of Bone where the driving factors, among others: the legislation set about training, cooperation between the institutions involved in the training of such officers, Provincial Education Office LPMP, University of training and education service providers area, the availability of facilities and infrastructure, high levels of participation to training by the teachers; While the restricting factors, among others: there is still a remote access to school, such as the Interior and Islands so that teachers in the school are not able to attend training, budget constraints, and the Regional Office of education limited in doing teacher training because education service is not an agency of authority to formulate/define the training will be done in the area.

Keywords: Management of Teachers Education and Training

Abstrak

Sartika Budiana. 2016. Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Guru di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone (dibimbing oleh Chalid Imran Musa dan Ratmawati T.)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (i) gambaran manajemen Pendidikan dan Pelatihan Guru di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, (ii) faktor pendorong dan penghambat Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan Guru Di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi serta dilakukan pengabsahan data dengan triangulasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang yaitu: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kepala Badan Kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Seorang pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, dan seorang pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (i) manajemen Pendidikan dan Pelatihan Guru di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone meliputi empat tahapan yaitu (a) perencanaan yang bersifat teknis, (b) pengorganisasian yang meliputi pembagian tugas kepanitian, (c) pelaksanaan yang merupakan implementasi dari perencanaan, dan (d) monitoring/evaluasi yang meliputi proses pengawasan sebagai bahan untuk perbaikan dalam pelaksanaan Diklat selanjutnya; (ii) terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat terkait manajemen Diklat Guru di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dimana faktor-faktor pendorong antara lain yaitu: UU yang mengatur tentang pelatihan, kerjasama antara lembaga-lembaga yang berperan dalam pelatihan pegawai seperti LPMP, Dinas pendidikan Provinsi, Universitas penyelenggara pelatihan dan Dinas pendidikan daerah, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat partisipasi yang tinggi terhadap pelatihan oleh guru-guru; sedangkan faktor-faktor penghambatnya antara lain: masih ada sekolah yang aksesnya jauh, seperti daerah pedalaman dan kepulauan sehingga guru di sekolah tersebut tidak dapat mengikuti pelatihan, keterbatasan anggaran, dan dinas pendidikan daerah terbatas dalam melakukan pelatihan guru dikarenakan dinas pendidikan bukan merupakan instansi yang berwenang merumuskan/ menentukan pelatihan yang akan di lakukan di daerah.

Kata kunci: Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Guru, Diklat.

Pendahuluan

Setiap organisasi atau instansi pemerintah baik instansi yang berskala besar maupun instansi yang ruang lingkupnya kecil, selalu mendambakan tersedianya Pegawai Negeri Sipil (guru) yang berkualitas dan cakap dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan kepadanya, Pegawai Negeri Sipil (guru) yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah.

Nainggolan (1987) mengemukakan bahwa, diperlukan Pegawai Negeri Sipil (guru) yang bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, berkualitas tinggi dan sadar terhadap tanggung jawabnya. Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil seperti dimaksud, berbagai macam cara dan pembinaan terus menerus dilaksanakan, salah satu diantaranya melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada peningkatan kepribadian, mutu dan kemampuan, baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinannya. Kaitannya dengan hal tersebut, Wursanto (1994) mengemukakan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu para pegawai, baik pengetahuan, kemampuan, keterampilan maupun mentalnya, diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi guru pada dasarnya merupakan suatu bagian yang integral dari manajemen dalam bidang ketenagaan di sekolah dan merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru sehingga pada gilirannya diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Mengingat program ini merupakan salah satu unggulan, maka diharapkan program ini dapat terlaksana secara memadai dan komprehensif sehingga diperlukan adanya manajemen yang baik.

Menurut Nickel, McHugh & Mchugh dalam Saefullah (2008), manajemen adalah sebuah proses untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Sejalan dengan itu, Terry (1999) mengemukakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas, terdiri dari

tindakan-tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dari beberapa pengertian tersebut, menunjukkan bahwa manajemen dipandang sebagai suatu proses mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan sampai pada pengawasannya.

Terkait tentang pendidikan dan pelatihan, Hasibuan (1994) mengemukakan bahwa pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan di dalam kelas, berlangsung lama dan biasanya menjawab “*Why*” sedangkan pelatihan berorientasi pada praktek, dilakukan di lapangan berlangsung singkat dan menjawab “*How*”. Lebih lanjut, Hamalik (2001) mengemukakan bahwa pelatihan merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi.

Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam penelitian ini merupakan proses manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan diklat guru. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) gambaran manajemen pendidikan dan pelatihan guru di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, dan (2) faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen pendidikan dan pelatihan guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang ingin mengetahui dan mengembangkan manajemen pendidikan dan pelatihan guru sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana data yang terkumpul berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dan diamati. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, yang dapat di jadikan sebagai informan utama yang mengetahui seluk beluk manajemen pendidikan dan pelatihan guru. Adapun yang menjadi informan terdiri dari 4 orang yaitu: Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Kepegawaian, seorang pegawai Dinas Pendidikan yang berperan sebagai panitia pelaksanaan diklat, dan seorang pengawas Dinas Pendidikan.

Data terkait manajemen diklat guru diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan data penunjang lain baik berupa literatur serta dokumen diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Tipe wawancara yang dilakukan yaitu wawancara *snowball* dimana pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena orang pertama ini data belum dirasa lengkap, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang di berikan oleh orang sebelumnya.

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau berbagai perbandingan terhadap data itu. Setelah pemeriksaan keabsahan data, dilakukan analisis data secara deskriptif.

Hasil Penelitian

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi gambaran manajemen diklat guru dan faktor pendukung serta penghambat dalam manajemen diklat guru di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

1. Gambaran Manajemen Diklat Guru di Kantor Dinas Kabupaten Bone

Manajemen diklat guru di Kantor Dinas Kabupaten Bone dideskripsikan dalam 4 tahapan yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, diperoleh keterangan bahwa perencanaan yang dipersiapkan dalam penyelenggaraan suatu diklat sifatnya mendasar seperti pembentukan panitia, pembentukan promotor, pembawa materi, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan dan tempat pelaksanaan. Kepala Bidang Kepegawaian juga memberikan keterangan bahwa dalam kegiatan pelatihan, Dinas Pendidikan tidak lagi melakukan perencanaan seperti penentuan kebutuhan secara khusus, Dinas Pendidikan daerah hanya mengirim nama-nama jika ada permintaan dari pusat dan provinsi yang akan diikuti sertakan dalam pelatihan dan tentunya dengan mengutamakan yang belum pernah ikut pelatihan tersebut. Lebih lanjut salah satu pegawai yang juga sebagai panitia dalam penyelenggaraan diklat mengemukakan bahwa perencanaan yang dilakukan hanya bersifat teknis, seperti melakukan persiapan dengan mengadakan rapat dengan para anggota-anggota yang akan ikut berkontribusi.

Dari uraian hasil wawancara di atas, diketahui bahwa perencanaan diklat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan daerah sifatnya hanya teknis saja seperti melakukan rapat anggota yang terdiri dari panitia, penanggung jawab, dan pendamping dalam rangka membicarakan pelatihan yang akan diselenggarakan dengan tujuan agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar. Disamping itu, dari dokumentasi yang dilakukan, diperoleh surat keputusan LPMP yang merupakan surat perintah pelaksanaan pelatihan sasaran guru pelaksana kurikulum 2013, dimana salah satu poinnya yaitu LPMP memutuskan Dinas Pendidikan daerah berperan sebagai panitia pelaksana dan LPMP sebagai penanggung jawab.

b. Pengorganisasian

Terkait dengan pengorganisasian dalam penyelenggaraan diklat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone mengemukakan bahwa pada bidang-bidang dalam penyelenggaraan suatu diklat, telah ada pembagian tugasnya masing-masing seperti di bidang kepegawaian yaitu bidang yang mengetahui dan mengatur tentang pembinaan pegawai, selain itu jika pelatihannya untuk pelaksanaan

kurikulum maka ini sudah ada juga bagian kurikulum di kantor dinas. Selanjutnya Kepala Bidang Kepegawaian menjelaskan bahwa tugas-tugas dari Dinas Pendidikan daerah dalam penyelenggaraan pelatihan yaitu sebagai panitia, dan pemateri. Panitia tersebut sudah terbentuk dari awal, sedangkan untuk yang berperan sebagai pemateri dipilih orang-orang yang sesuai dengan kapasitas masing-masing sesuai tema diklat yang akan diselenggarakan. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh seorang pegawai yang juga menjadi panitia penyelenggaraan diklat bahwa Dinas Pendidikan Daerah berperan dalam pembentukan panitia.

Hasil dokumentasi juga menunjukkan hal yang sama. Dalam arsip berupa surat putusan dari LPMP no: 3172/J20.3/KP/2016 dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan daerah di berikan tanggung jawab sebagai panitia yang bertanggung jawab tentang administrasi pelaksanaan pelatihan guru.

c. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan Diklat, dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Bone diperoleh informasi bahwa dalam proses pelatihan akan diawali dengan tes seleksi tertulis dan wawancara dan tempat pelaksanaannya, bentuk pelatihan berupa penerimaan materi dari nara sumber, mengerjakan tugas-tugas yang di berikan, persentasi hasil kerja, dan di akhiri dengan tes tertulis. Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Kepegawaian juga menerangkan bahwa terdapat rangkaian kegiatan seperti menerima materi dari instruktur, mempraktekkan, mengerjakan tugas-tugas yang menyangkut tentang pelatihan, dan akan di berikan tes di akhir pelatihan, setelah itu panitia pelaksana (Dinas Pendidikan) akan mengumpulkan hasil tersebut dan memberikan penilaian untuk mengetahui pemahaman setiap peserta pelatihan setelah melakukan pelatihan.

Seorang pegawai Dinas Pendidikan lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan diawali dengan pemberian surat kepada seluruh sekolah yang terdaftar sebagai peserta pelatihan untuk mengirimkan guru-guru yang namanya terdaftar untuk mengikuti pelatihan setelah itu peserta akan diregistrasi oleh panitia, pelaksanaan pelatihan yang sering diadakan tempatnya bukan di

Kantor Dinas Pendidikan melainkan di tempat yang telah di tentukan oleh penanggung jawab kegiatan seperti di gedung PGRI, LPMP, Universitas. Dana yang di gunakan dalam pelatihan itu sebagian besar berasal dari pusat, provinsi dan dana BOS sekolah, jadi dana pelatihan yang di selenggarakan di daerah itu tidak mendapatkan dana dari daerah.

d. Monitoring/evaluasi

Pada proses evaluasi, diperoleh keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil pelatihan oleh Dinas Pendidikan yaitu dengan memfungsikan pengawas sekolah di mana pengawas turun langsung ke lapangan melihat penerapan yang di terapkan oleh guru-guru setelah melakukan pelatihan, dengan adanya tim pengawas dari lingkungan Dinas Pendidikan maka penerapan hasil pelatihan di sekolah yang di dapatkan pada saat pelatihan.

Seorang pengawas juga menerangkan bahwa dalam proses monitoring yang berperan adalah bagian pengawasan, di mana pengawas itu memiliki fungsi sebagai pengawas kepala sekolah, pengawas guru mata pelajaran, yang berperan mengawasi metode mengajar, kelengkapan RPP, Silabus, penerapan kurikulum, dan lain-lain. Selain itu juga dalam proses pelatihan pengawas juga berperan sebagai pemberi materi sehingga pengawas dengan mudah melakukan monitoring terhadap guru yang telah ikut dalam pelatihan, adapun bentuk evaluasi yang dilakukan yaitu setelah pengawas memonitor dan mendapatkan kekurangan dalam penerapan hasil pelatihan maka pengawas akan melakukan pertemuan di sekolah dan membahas permasalahan-permasalahan atau kekurangan penerapan hasil pelatihan bersama guru pelaksana dan seluruh guru, sehingga kekurangan tersebut dapat diperbaiki.

Dari uraian hasil wawancara tersebut ditunjukkan bahwa dalam proses monitoring dan evaluasi yang berperan penting adalah para pengawas dikarenakan pengawaslah yang turun langsung ke sekolah untuk melihat langsung penerapan yang dilaksanakan oleh guru-guru, sehingga pengawas sekolah dapat dengan cepat melakukan evaluasi guna memperbaiki kekurangan yang terjadi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Diklat Guru di Kabupaten Bone

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, diperoleh informasi bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam terlaksananya pelatihan yang di inginkan yaitu, kerjasama antar lembaga dan panitia yang terjalin dengan baik, ketersediaan instruktur dan tenaga kepelatihan yang handal, serta tingginya respon para guru terhadap kegiatan pelatihan. Salah seorang pegawai Dinas Pendidikan juga menambahkan bahwa kunci dari kesuksesan pelaksanaan pelatihan itu berada pada bentuk kerjasama yang terjalin antara penanggung jawab pelaksana, panitia pelaksana, instruktur, pendamping, dan pemateri. Jika seluruh elemen tersebut dapat bekerja sama dengan baik maka dapat di pastikan pelatihan akan berjalan sesuai dengan rencana, namun sebaliknya jika ada salah satu dari unsur ini yang tidak bisa bekerja sama maka proses pelatihan akan terganggu.

Mengenai faktor penghambat penyelenggaraan Diklat, Kepala Dinas mengemukakan bahwa salah satu faktor penghambat pelaksanaan diklat adalah masih adanya guru yang tidak bisa mengikuti diklat dikarenakan letak lokasi tempat mengajarnya berada di daerah terpencil. Sementara itu, kepala bagian kepegawaian menambahkan bahwa yaitu permasalahan anggaran, di mana tidak ada anggaran yang tersedia dari daerah untuk biaya pelatihan guru, semua anggaran berasal dari pusat atau provinsi sehingga Dinas Pendidikan tidak bisa menentukan jenis pelatihan dan jadwal pelatihan tersendiri, sehingga pelatihan itu akan terlaksana sesuai dengan ketersediaan anggaran dari pusat dan provinsi saja.

Pembahasan

Manajemen pendidikan dan pelatihan (diklat) guru oleh Dinas Pendidikan daerah yaitu terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Diklat merupakan salah satu solusi meningkatkan kualitas pegawai, khususnya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone bila Diklat tersebut di laksanakan secara sistematis dan berdasarkan tahapan-tahapan sesuai dengan kebutuhan peserta dan instansi serta dengan pemanfaatan

sumber daya yang optimal dan signifikan. Sebagaimana di tegaskan dalam Undang-undang Kepegawaian No. 43 tahun 1999 (2000: 95) bahwa sasaran Diklat adalah tersedianya Pegawai Negeri Sipil (guru) yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk di angkat dalam jabatan struktural.

Sesuai dengan temuan peneliti menyangkut perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan daerah dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, Dinas Pendidikan hanya sebatas merencanakan tentang tugasnya sebagai panitia pelaksana dalam pelatihan, yaitu merencanakan tempat pelaksanaan pelatihan, merencanakan sarana dan prasarana yang di gunakan dalam pelatihan, dan merencanakan pembagian tugas panitia pelaksana pelatihan. Perencanaan merupakan langkah awal sebelum melangkah ke proses berikutnya dalam manajemen. Menurut Usman (2006) perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan di laksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan.

Dalam program pelatihan guru terdapat dua lembaga yang melakukan pengorganisasian yaitu LPMP dan Dinas Pendidikan, di mana LPMP dalam melaksanakan pelatihan di daerah maka akan melakukan pengorganisasian terlebih dahulu yaitu, menentukan siapa yang menjadi penanggung jawab kegiatan, nara sumber, instruktur, panitia, pendamping dan, peserta. Dalam hal ini yang ditunjuk sebagai panitia adalah Dinas Pendidikan sehingga sebagai panitia, Dinas Pendidikan melakukan pembagian tugas terhadap pegawai-pegawai yang dijadikan panitia, adapun yang berwenang untuk melakukan pembagian tugas tersebut adalah kepala dinas sebagai ketua panitia.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan pelatihan, peserta akan diberikan pra-tes sebelum pelatihan dilakukan, selanjutnya peserta akan diberikan materi pelatihan oleh pemateri, peserta akan diberikan tugas oleh instruktur yang bersangkutan dengan materi pelatihan, peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang telah menjadi fokus pelatihan, dan yang terakhir peserta akan diberikan tes, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan.

Pada tahap monitoring/evaluasi hasil pelatihan, Dinas Pendidikan mengawasi hasil pelatihan untuk memastikan apakah peserta pelatihan dapat menerapkan dengan baik apa yang telah dipelajari pada saat pelatihan atau tidak, adapun cara yang dilakukan untuk memonitoring yaitu Dinas Pendidikan Daerah menggerakkan tim pengawas sekolah langsung turun ke lapangan untuk melihat dan mengawasi penerapan hasil dari pelatihan. Jika pengawas mendapati kekurangan-kekurangan pada saat penerapan dari hasil pelatihan maka pengawas melakukan evaluasi dengan cara melakukan rapat di sekolah dengan tujuan membahas kekurangan-kekurangan tersebut dan pengawas dapat memberikan pelatihan singkat terhadap guru-guru sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dapat diperbaiki.

Pengawas yang di turunkan untuk mengawasi kepala sekolah dan guru-guru dalam menjalankan peranannya adalah pengawas yang mampu melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang di hadapi oleh-guru-guru sehingga terkadang pengawas juga dalam proses pelatihan dapat di jadikan sebagai pemateri.

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pelatihan guru dinas pendidikan maka telah di temukan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pendidikan dan pealtihan guru di dinas pendidikan daerah yaitu untuk faktor yang mendukung: (1) aturan tentang pelatihan pegawai telah di atur dalam UU, (2) kerja sama antara lembaga-lembaga yang berperan dalam pelatihan pegawai seperti LPMP, Dinas pendidikan Provinsi, Universitas penyelenggara pelatihan dan Dinas pendidikan daerah, (3) kerja sama sluruh elemen yang berperan dalam kegiatan pelatihan, seperti: penanggung jawab kegiatan, pemateri, instruktur, panitia, pendamping dan peserta, (4) ketersediaan sarana dan prasana, (5) tingkat partisipasi yanggi terhadap pelatihan oleh guru-guru.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan di daerah yaitu seperti (1) masih ada sekolah yang aksesnya jauh seperti daerah pedalaman dan kepulauan yang tidak dapat mengikuti pelatihan, (2) keterbatasan anggaran, dan (3) dinas pendidikan daerah terbatas dalam melakukan pelatihan guru di karenakan dinas pendidikan bukan merupakan instansi yang

berwewenang merumuskan pelatihan yang akan di lakukan di daerah, sehingga dinas pendidikan di daerah hanya dapat melaksanakan pelatihan jika ada perintah atau tembusan dari pusat dan provinsi.

Kesimpulan

Manajemen Diklat Guru di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone terdeskripsikan dalam empat tahap yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi. Pada tahap perencanaan, dilakukan perencanaan yang bersifat teknis saja antara lain menyediakan surat tugas peserta dan instruktur serta menyediakan daftar hadir peserta, instruktur dan panitia. Pada tahap pengorganisasian, Dinas Pendidikan diberikan wewenang untuk dapat membentuk panitia pelaksana, seperti menentukan ketua panitia, sekertaris panitia, dan anggota. Pada tahap pelaksanaan, diselenggarakan sampai dengan satu minggu, atau sesuai dengan ketentuan yang telah di tentukan oleh lembaga pelaksana pelatihan. Dalam kegiatan pelatihan terdapat beberapa jenis pelatihan yang biasa di selenggarakan yaitu: pelatihan peningkatan mutu pendidik, pelatihan kepala sekolah, pelatihan sasaran pelaksanaan kurikulum, pelatihan penggunaan teknologi dan sebagainya. Pada tahap monitoring/evaluasi, pengawas sekolah yang ditugaskan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengawasi dan melihat apa-apa kekurangan yang di hadapi oleh guru, kepala sekolah, dan ketersediaan sarana dan prasarana, sehingga dinas pendidikan dapat mengevaluasi kembali apa yang perlu diperbaiki.

Dalam diklat guru di Kabupaten Bone terdapat beberapa faktor yang berpengaruh yaitu faktor yang sifatnya mendorong dan menghambat; (1) Faktor pendorong: aturan tentang pelatihan pegawai telah diatur dalam UU, kerja sama antara lembaga-lembaga dan seluruh elemen yang berperan dalam pelatihan pegawai seperti LPMP, Dinas pendidikan Provinsi, Universitas penyelenggara pelatihan dan Dinas pendidikan daerah. (2) Faktor penghambat: masih ada sekolah yang aksesnya jauh, seperti daerah pedalaman dan kepulauan sehingga tidak dapat mengikuti pelatihan, keterbatasan anggaran, dan dinas pendidikan daerah terbatas dalam melakukan pelatihan guru di karenakan dinas pendidikan bukan merupakan

instansi yang berwenang merumuskan/menentukan pelatihan yang akan di lakukan di daerah.

Daftar Pustaka

- Hamalik, Oemar. 2001. *Manajemen Pelatihan dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Nainggolan. 1987. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Pertja.
- Saefullah. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Terry. 1999. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Kepegawaian No. 43 tahun 1999.
- Usman, Uzer. 2006. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wursanto. 1994. *Manajemen Kepegawaian I*. Yogyakarta: Kanisius.